

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan teori**

##### **1. Teori agensi (agency theory)**

Teori keagenan (*agency theory*) yaitu hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Agen (manajer) mempunyai kewenangan untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan atas nama investor. Masalah keagenan adalah munculnya konflik kepentingan antara harapan investor (memperoleh *return* maksimal) dengan harapan para manajer. Manajer yang seharusnya mengelola organisasi bisnis dengan baik agar kepentingan investor optimal, ternyata dalam faktanya sering kali lebih mengedepankan kepentingan dirinya sendiri yang sering kali disebut tindakan moral hazard (Haryani *et al.*, 2011)

Salah satu masalah keagenan (*agency problem*) yang terjadi antara manajer dan pemegang saham adalah pemegang saham lebih menyukai pembayaran deviden daripada diinvestasikan lagi. Sebaliknya, manajer meniginkan deviden yang dibayarkan diinvestasikan lagi kembali untuk menambah modal perusahaan (Mursalim,2011).

Uraian diatas terkait dengan teori keagenan (*agency theory*), dimana antara manajer sebagai agen dan pemegang saham sebagai principal masing-masing ingin memaksimalkan kemakmurannya. Namun, manajer lebih menguasai informasi dibanding pemegang saham karena manajer mengelola perusahaan secara langsung sedangkan pemegang saham sulit

memperoleh informasi secara efektif tentang operasional perusahaan sehingga terjadi *information asymmetry*. Hal ini memicu manajer sebagai agen untuk melakukan tindakan-tindakan oportunistik seperti; melakukan inefisiensi, investasi pada proyek dengan *net present value* yang negative dan sebagainya. Tindakan manajer dengan kepentingannya dan mengabaikan kepentingan para pemegang saham perusahaan, sehingga menimbulkan terjadinya *agency theory* dalam perusahaan (Mursalim,2012).

Untuk mengurangi *agency problem* antara manajer dengan pemegang saham dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, adanya monitoring oleh investor institusional, seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan perseroan terbatas maupun institusi independen yang memiliki otoritas menilai kinerja manajemen perusahaan. Kedua, tidak cukup kepemilikan saham saja, akan tetapi diperlukan adanya aktivisme institusi untuk menekan para manajer agar tidak melakukan tindakan *opportunistic*. Ketiga, adanya peningkatan kepemilikan manajerial atas perusahaan sebagai insentif dalam upaya menekan tindakan oportunistiknya. Keempat, adanya kebijakan deviden perusahaan. Kelima, adanya kebijakan utang. (Mursalim,2011).

Menanggapi adanya konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajer dengan menyatakan bahwa *corporate governance* merupakan respon perusahaan terhadap konflik tersebut. Aspek-aspek *corporate governance* seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, dan jumlah anggota komite audit dipandang sebagai mekanisme control yang tepat untuk mengurangi konflik keagenan.

## 2. Teori sinyal (*Signaling theory*)

*Signaling theory* mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan manajemen untuk merealisasikan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain (Jama'an, 2008).

*Signaling theory* menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal, karena terdapat asimetri informasi (*asymmetry information*) antara perusahaan dan pihak luar. Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah kepada perusahaan.

Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan mengurangi asimetri informasi. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar, salah satunya berupa keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang.

Hal ini senada dengan pendapat Rustriarini (2010) yang mengungkapkan bahwa teori sinyal membahas mengenai dorongan perusahaan untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal. Dorongan tersebut disebabkan karena terjadinya asimetri informasi antara pihak manajemen dan pihak eksternal. Untuk mengurangi asimetri informasi maka perusahaan harus

mengungkapkan informasi yang dimiliki, baik informasi keuangan maupun non keuangan.

Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba yang berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak *overstate* (Jama'an.2008).

Teori signal juga dapat membantu pihak perusahaan (*agent*), pemilik (*principal*), dan pihak luar perusahaan mengurangi sismetri informasi dengan menghasilkan kualitas dan integritas laporan keuangan. Untuk memastikan pihak-pihak yang berkepentingan menyakini keandalan informasi keuangan yang disampaikan pihak perusahaan (*agent*), perlu mendapatkan opini dari pihak lain yang bebas memberikan pendapat tentang laporan keuangan.

Sinyal opini bebas yang diberikan oleh kantor akuntan public (KAP) merupakan sinyal yang mencerminkan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan perusahaan yang telah di audit. Kualitas kantor akuntan public (KAP) juga dapat memberikan sinyal kepercayaan pihak perusahaan (*agent*), pemilik (*principal*), dan pihak pihak lain yang berkepentingan atas legalitas dan integritas opini bebas yang dikeluarkan akuntan.

Integritas informasi laporan keuangan yang mencerminkan nilai perusahaan merupakan sinyal positif yang dapat mempengaruhi opini investor

dan kreditor atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Laporan keuangan harusnya memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor untuk membuat keputusan investasi, kredit dan kepuasan sejenis (Jama'an,2008).

Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik (*principal*). Sinyal yang diberikan dapat melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Akan tetapi sinyal informasi yang disampaikan *agent* terkadang diterima *principal* tidak sesuai dengan kondisi dan ukuran keberhasilan perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (*information asymmetric*) yang sudah dijelaskan diatas.

### **3. Integritas laporan keuangan**

#### **Pengertian integritas laporan keuangan**

Integritas secara terminologi berarti mutu, sifat, atau keandalan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Integritas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara manajemen dengan pihak luar perusahaan tentang data keuangan atau aktivitas perusahaan tersebut selama periode tertentu. Di dalam PSAK tahun 2009 disebutkan

bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja serta posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan ekonomi oleh para pengguna laporan keuangan apabila informasi yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut memenuhi karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Dalam *Statement Of Financial Accounting Concept (SFAC) No.2* mengenai *qualitative characteristic of accounting information*, terdapat dua hal yang menjadi kualitas primer dalam suatu laporan keuangan, yaitu relevansi (*relevance*) dan keandalan (*reliability*).

Relevansi merujuk pada kemampuan informasi akuntansi untuk mempengaruhi keputusan pembaca laporan keuangan dengan mengubah atau membantu mengkonfirmasi harapan mereka tentang hasil atau konsekuensi suatu tindakan atau kejadian. Relevansi informasi dapat diukur dalam kaitannya dengan maksud pengguna informasi tersebut. Artinya jika suatu informasi tidak relevan dengan pengambilan keputusan, maka informasi akuntansi yang dapat diandalkan, yaitu informasi akuntansi yang bebas dari kesalahan dan penyimpangan serta merupakan suatu penyajian yang jujur.

Laporan keuangan dikatakan berintegritas apabila laporan keuangan tersebut memenuhi kualitas *reliability* dan sesuai dengan prinsip akuntansi

yang berterima umum. Menurut Saputri (2010) *reliability* memiliki kualitas sebagai berikut:

1. *Verifiability*

Laporan keuangan suatu entitas yang mempunyai kondisi yang sama dengan laporan keuangan entitas lain, akan mendapat opini yang sama jika diaudit oleh auditor yang berbeda.

2. *Representational faithfulness*

Angka dan keterangan yang disajikan sesuai dengan apa yang ada dan benar-benar terjadi.

3. *Neutrality*

Informasi dari laporan keuangan harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan berlawanan.

Terkait dengan integritas laporan keuangan, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang memiliki integritas yang tinggi maka telah memenuhi 2 karakteristik umum dalam suatu laporan keuangan. Informasi akuntansi yang memiliki integritas yang tinggi akan dapat diandalkan karena merupakan suatu penyajian jujur sehingga memungkinkan pengguna informasi akuntansi bergantung pada informasi tersebut. Oleh karena itu, informasi yang memiliki integritas yang tinggi memiliki kemampuan untuk

mempengaruhi keputusan pembaca laporan keuangan untuk membantu membuat keputusan.

Ukuran integritas laporan keuangan selama ini belum ada walaupun demikian secara intuitif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu diukur dengan konservatisme serta keberadaan manipulasi laporan keuangan yang biasanya diukur dengan manajemen laba. Laporan keuangan yang *reliable* atau berintegritas dapat dinilai dengan cara penggunaan prinsip konservatisme dan penggunaan *earning management* karena informasi dalam laporan keuangan akan lebih *reliable* apabila laporan keuangan tersebut konservatif dan laporan keuangan tersebut tidak *overstate* supaya tidak ada pihak yang dirugikan akibat informasi dalam laporan keuangan tersebut.

#### **4. Konservatisme akuntansi**

Konservatisme menurut FASB *Statement of Concept* No.2 didefinisikan dengan reaksi hati hati (*prudent reaction*) menghadapi ketidakpastian. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa ketidakpastian dan resiko yang melekat pada situasi bisnis telah cukup dipertimbangkan.

Konservatisme identik dengan kehati-hatian dalam pelaporan keuangan di mana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva dan laba serta mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan akan terjadi. Penerapan prinsip ini mengakibatkan pilihan metode akuntansi ditunjukkan pada metode yang melaporkan laba atau aktiva lebih rendah serta melaporkan hutang lebih tinggi. Dengan demikian, pemberi pinjaman akan menerima perlindungan atas resiko menurun (*downside risk*) dari neraca yang



menyajikan aset bersih *understatement* dan laporan keuangan yang melaporkan berita buruk secara tepat waktu.

Para kreditur mendesak agar laporan keuangan disusun dengan berpedoman konsep konservatisme. Maksud utama lain mereka adalah untuk menetralsir optimisme para usahawan yang terlalu berlebihan dalam melaporkan hasil usahanya. Jika ditinjau lebih jauh ke dalam laporan keuangan, setiap metode akuntansi yang dipilih oleh perusahaan memiliki tingkat konservatisme yang berbeda-beda. PSAK tahun 2009, menyebutkan ada berbagai metode yang menerapkan prinsip konservatisme, diantaranya PSAK No.14 mengenai persediaan yang terkait dengan pemilihan perhitungan biaya persediaan, PSAK No.16 mengenai aktiva tetap dan penyusutan, PSAK No.19 mengenai aktiva tidak berwujud yang berkaitan dengan amortisasi dan PSAK No.20 tentang biaya riset dan pengembangan.

Pilihan metode tersebut akan berpengaruh terhadap angka yang disajikan dalam laporan keuangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung konsep konservatisme ini akan mempengaruhi hasil dari laporan keuangan tersebut. Penerapan konsep ini juga akan menghasilkan laba yang berfluktuatif, dimana laba yang berfluktuatif akan mengurangi daya prediksi laba untuk memprediksi aliran kas perusahaan pada masa yang akan datang (Sari dan Adhariani, 2009).

Terdapat pro kontra sehubungan dengan penerapan prinsip konservatisme. Pengkritik konsep konservatisme menyatakan bahwa prinsip ini mengakibatkan laporan keuangan menjadi bias sehingga dapat dijadikan

sebagai alat untuk mengevaluasi resiko perusahaan. Semakin tinggi konservatisme, maka nilai buku yang dilaporkan semakin bias. Di lain pihak, terdapat pihak yang mendukung konsep konservatisme ini, diantaranya adalah Haniati dan Fitriany (2010) yang menyatakan bahwa konsep konservatisme dapat mengurangi konflik antara *bondholders-shareholders* seputar kebijakan deviden.

Pembayaran deviden yang tinggi menjadi ancaman bagi *debtholders* karena akan mengurangi aktiva yang seharusnya teredia untuk pelunasan utang. Untuk mengatasi masalah ini, tindakan yang bias dilakukan adalah dengan melakukan pembatasan pembagian deviden berdasarkan perolehan laba perusahaan. Untuk itu dibutuhkan penyajian laba yang konservatif demi membatasi pembayaran deviden yang terlalu tinggi serta penyajian aktiva yang konservatif untuk memberikan gambaran kepada *debtholders* tentang ketersediaan aktiva untuk pembayaran hutang.

Fitriany (2010) juga merupakan pendukung konsep konservatisme berpendapat bahwa konservatisme merupakan salah satu karakteristik yang sangat penting dalam mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan dan harga sahamnya. Para pemegang saham mempunyai harapan agar manajemen bertindak atas kepentingan mereka. Untuk itu dibutuhkan pengawasan seperti pemeriksaan laporan keuangan serta pembatasan keputusan yang diambil manajemen. Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pengawasan tersebut disebut sebagai biaya agensi.

Penelitian ini yang mendukung konservatisme adalah Haniati dan Fitriany (2010) yang berpendapat bahwa laporan keuangan yang mengaplikasikan prinsip konservatisme dapat mengurangi kemungkinan manajer melakukan manipulasi laporan keuangan serta mengurangi deadweight los (biaya agensi) yang muncul sebagai akibat dari asimetri informasi (kondisi dimana pihak manajemen memiliki informasi lebih banyak dibandingkan dengan pihak investor). Asimetri informasi merupakan salah satu factor yang dapat menyebabkan manipulasi laporan keuangan. Manipulasi yang paling sering dilakukan adalah overstate laba. Hal ini karena laba dapat mencerminkan kinerja operasional perusahaan dan menjadi perhatian bagi pengguna laporan keuangan dalam menilai perusahaan.

Kinerja perusahaan akan mempengaruhi harga saham, sehingga menjadi alasan tambahan bagi manajemen melakukan manipulasi laporan keuangan apabila tidak mampu mencapai apa yang diinginkan. Kesempatan untuk dapat memilih beberapa metode akuntansi membuka peluang manajer melakukan manipulasi laporan keuangan. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menghindari manipulasi laporan keuangan adalah dengan menggunakan prinsip akuntansi konservatif.

## **5. Mekanisme *Corporate Governace***

Dalam Kurniawan (2012) terdapat beberapa definisi mengenai *corporate governance*, diantaranya sebagai berikut:

Menurut OECD (*Organisation for Economic Co-Operation And Development*) yang menyatakan bahwa:

*“Corporate governance relates to the internal means by which corporations are operated and controlled. While governments play a central role and shaping the legal, institutional and regulatory climate within which individual corporate governance system are developed, the main responsibility lies with the private sector”.*

Sedangkan *Berlin Initiative Code* berpendapat bahwa *corporate governance* adalah:

*“Corporate governance describe the legal and factual regulatory framework for managing and supervising a company”.*

Kemudian menurut *Recommendation Of Federation Of Companies, Corporate Governance* adalah:

*“The organization of the administration and management of companies, which is better known under the term “corporate governace,” has to meet the expectations of the shareholders and the requirements of the economic process”.*

Selanjutnya definisi *corporate governance* menurut Cadbury Comite dalam Jama'an (2008) adalah:

“seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan”. Tujuan *corporate governance* adalah “untuk

menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)”.

*Corporate governance* merupakan serangkaian mekanisme yang dapat melindungi pihak-pihak minoritas (*outside investor/minority shareholders*) dari ekspropriasi yang dilakukan oleh para manjer dan pemegang saham pengendali (*insider*) dengan penekanan pada mekanisme legal (Wawo,2013). Pendekatan legal dari *corporate governance* adalah proteksi investor eksternal (*outside investors*), baik pemegang saham maupun kreditor, melalui system legal yang dapat diartikan dengan hukum dan pelaksanaannya (Wawo,2013).

Menurut baridwan dalam Jama'an (2008) prinsip-prinsip pokok *corporate governance* yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya praktik *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

*a. Transparency*

Yaitu mengelola perusahaan secara transparan dengan semua stakeholders perusahaan baik yang terlibat secara langsung di dalam perusahaan atau yang tidak terlibat langsung. Di sini para pengelola perusahaan harus berbuat secara transparan kepada pemegang saham, jujur apa adanya dalam membuat laporan usaha dan tidak manipulatif. Keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang dianggap penting dan relevan.

*b. Accountability*

Yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban dalam perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Manajemen harus membuat job description yang jelas kepada semua karyawan dan menegaskan fungsi-fungsi dasar setiap bagian. Dari sini perusahaan akan menjadi jelas hak dan kewajibannya, fungsi dan tanggung jawabnya serta kewenangannya dalam setiap kebijakan perusahaan.

*c. Responsibility*

Yaitu menyadari bahwa ada bagian-bagian perusahaan yang membawa dampak pada lingkungan dan masyarakat pada umumnya. Di sini perusahaan harus memperhatikan amdal, keamanan lingkungan, dan kesesuaian diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat. Perusahaan harus apresiatif dan proaktif terhadap setiap gejolak sosial masyarakat dan setiap yang berkembang di masyarakat.

*d. Independency*

Yaitu berjalan tegak dengan bergandengan bersama masyarakat. Perusahaan harus memiliki otonominya secara penuh sehingga pengambilan-pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan otoritas yang ada secara penuh. Perusahaan harus berjalan dengan menguntungkan supaya bisa memelihara keberlangsungan bisnisnya, namun demikian bukan keuntungan yang tanpa melihat orang lain yang

juga harus untung. Semuanya harus untung dan tidak ada satu pun yang dirugikan.

*e. Fairness*

Yaitu semacam kesetaraan atau perlakuan yang adil di dalam memenuhi hak dan kewajibannya terhadap stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus membuat sistem yang solid untuk membuat pekerjaan semuanya seperti yang diharapkan. Dengan pekerjaan yang *fair* tersebut diharapkan semua peraturan yang ada ditaati guna melindungi semua orang yang punya kepentingan terhadap keberlangsungan bisnis kita.

Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol/pengawasan terhadap keputusan tersebut. Jama'an (2008) menyatakan bahwa terdapat 2 mekanisme untuk dapat membantu menyamakan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer dalam rangka penerapan GCG, diantaranya mekanisme pengendalian internal perusahaan dan mekanisme pengendalian eksternal berdasarkan pasar.

Mekanisme pengendalian internal perusahaan adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan dengan membuat seperangkat aturan yang mengatur tentang mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, return, maupun risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Salah satu pilihan mekanisme pengendalian internal untuk menyamakan kepentingan

pemegang saham dan manajer adalah kontrak insentif jangka panjang. Kontrak jangka panjang ini dilakukan dengan memberikan insentif pada manajer apabila nilai perusahaan atau kemakmuran pemegang saham meningkat, salah satunya dengan cara memberikan kepemilikan saham kepada manajer. Dengan demikian, manajer akan termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan atau meningkatkan kemakmuran pemegang saham karena hal tersebut juga akan meningkatkan kekayaan manajer sendiri.

Mekanisme pengendalian eksternal berdasarkan pasar adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan oleh pasar menurut teori pasar untuk pengendalian perusahaan (*Market For Corporate Control*), pada saat diketahui bahwa manajemen berperilaku menguntungkan diri sendiri, kinerja perusahaan akan menurun yang direfleksikan oleh nilai saham perusahaan. Pada kondisi tersebut, kelompok manajer lain akan menggantikan manajer yang sedang memegang jabatan. Dengan demikian bekerjanya *market for corporate control* bisa menghambat tindakan menguntungkan diri manajer sendiri.

Mekanisme pengendalian lain yang secara luas digunakan dan diharapkan dapat menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen adalah mekanisme melalui pelaporan keuangan. Melalui laporan keuangan yang merupakan tanggungjawab manajer, pemilik dapat menilai, mengukur sekaligus dapat mengawasi kinerja manajer untuk mengetahui sejauh mana manajer telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik. Selain itu pemilik dapat memberikan kompensasi kepada manajer berdasarkan laporan keuangan.



Laporan keuangan yang dibuat berdasarkan angka-angka akuntansi diharapkan berperan besar dalam meminimalkan konflik antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan (Jama'an, 2008).

Dalam hubungannya dengan jenis informasi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan, terdapat dua jenis sifat informasi yang diungkapkan, diantaranya adalah informasi yang bersifat *mandatory disclosure*, yaitu merupakan informasi yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan karena memang diwajibkan oleh peraturan atau undang-undang. Kemudian informasi yang bersifat *voluntary disclosure*, yaitu merupakan jenis informasi yang secara sukarela diungkapkan di dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk menambah kegunaan informasi mengenai kekayaan dan hasil operasi suatu perusahaan kepada para pemakai laporan keuangannya.

Dewan komisaris dan komite audit, sebagai struktur *corporate governance*, mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam rangka memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*. Berjalannya fungsi dewan komisaris dan komite audit secara efektif, maka control terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham mayoritas dan manajemen dengan pemegang saham minoritas dapat diminimalisasi. Oleh karena itu untuk menghindari penyalahgunaan wewenang antara pihak manajemen dengan kepentingan pemegang saham, perusahaan menyepakati penerapan *good corporate governance* sebagai suatu

sistem pengelolaan perusahaan yang baik untuk mencapai tujuan dan mengawasi kinerja perusahaan (Sulistiyowati *et al.*,2010).

Mekanisme tata kelola perusahaan yang diterapkan oleh perusahaan haruslah mampu mengurangi asimetri informasi melalui pengungkapan informasi dalam laporan keuangan dengan benar dan jelas. Sistem keuangan yang baik akan menghasilkan yaitu: pertama, informasi yang luas dan murah yang dapat memfasilitasi pemantauan oleh pemegang saham secara efektif, dan kedua, memungkinkan bagi dewan komisaris untuk meningkatkan nilai pemegang saham melalui pemberian saran, penentuan keputusan-keputusan dan aktivitas-aktivitas manajerial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaporan keuangan merupakan salah satu kunci dalam mekanisme perusahaan yang berfungsi meningkatkan akuntabilitas dan nilai perusahaan. Dalam penelitian ini, elemen-elemen yang terkandung dalam pengukuran mekanisme tata kelola perusahaan adalah:

#### **a. Kepemilikan Institusional**

Jumlah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi atau perusahaan. Organisasi memiliki kemampuan untuk bertahan apabila terdapat pemisahan antara pemilik dan pengendalinya. Struktur kepemilikan saham dalam suatu perusahaan dapat terdiri atas kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi dan kepemilikan saham oleh manajerial. Institusi sebagai pemilik saham dianggap lebih mampu dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi. Hal ini dikarenakan investor institusi lebih berpengalaman dibandingkan dengan investor individual. Dengan

demikian akan semakin membatasi manajemen dalam memainkan angka-angka dalam laporan keuangan. (Sriwedari, 2009).

#### **b. Kepemilikan Manajerial**

Jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham yang dikelola. Kepemilikan manajerial merupakan salah satu isu penting dalam teori keagenan sejak dipublikasikan oleh Sriwedari (2009), yang menyatakan bahwa dengan semakin besarnya proporsi kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan maka manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri. Sedangkan menurut Widarjo *et al.*,(2010) kepemilikan manajerial adalah situasi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus pemilik atau pemegang saham perusahaan.

Manajer yang memiliki saham dalam perusahaan akan berusaha meningkatkan kinerja perusahaan, karena dengan meningkatnya laba perusahaan maka insentif yang diterima oleh manajer akan meningkat pula. Sebaliknya apabila kepemilikan manajer turun, maka biaya keagenannya akan meningkat. Hal ini dikarenakan manajer akan melakukan tindakan yang tidak memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, manajer akan cenderung memanfaatkan sumber-sumber perusahaan untuk kepentingannya sendiri.

### c. Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai penghubung antara dewan direksi dan audit eksternal, internal auditor serta anggota independen, yang memiliki tugas untuk memberikan pengawasan auditor, memastikan manajemen melakukan tindakan korektif yang tepat terhadap hukum dan regulasi (Suryono dan Prastiwi, 2011). Peraturan mengenai komite audit dikeluarkan oleh Bapepam pada Mei 2000, melalui SE/03/PM/2000, Keputusan Ketua Bapepam Kep-29/PM/2004, Peraturan Bapepam-LK No. IX. 1.5, Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012.

Berdasarkan peraturan ini dijelaskan bahwa komite audit harus memiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedang anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen di mana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan atau keuangan (Wardhaniet *et al.*,2010).

Tujuan pembentukan komite audit adalah memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum, memastikan bahwa internal kontrol perusahaan memadai, menindak lanjuti dugaan adanya penyimpangan

yang material di bidang keuangan dan implikasi hukumnya, dan merekomendasikan seleksi auditor eksternalnya (Jama'an, 2008).

#### **d. Komisaris Independen**

Di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (*Task Force Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance*).

Dewan komisaris adalah pihak yang berperan penting dalam menyediakan laporan keuangan perusahaan yang reliable. Proporsi anggota independen dalam dewan komisaris dapat dikatakan sebagai indikator independensi dewan dari manajemen. Kehadiran komisaris independen dalam dewan dapat menambah kualitas aktivitas pengawasan dalam perusahaan, karena mereka tidak terafiliasi dengan perusahaan sebagai pegawai (Andarini dan Januarti, 2010).

Beasley (1996) menguji hubungan antara proporsi dewan komisaris dengan kecurangan pelaporan keuangan. Dengan membandingkan perusahaan yang melakukan kecurangan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan, mereka menemukan bahwa perusahaan yang melakukan kecurangan memiliki persentase dewan komisaris eksternal yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang

tidak melakukan kecurangan. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*.

#### **6. Ukuran Perusahaan (Firm Size)**

Para peneliti masih belum memiliki tolak ukuran yang jelas mengenai ukuran perusahaan. Kim *et al.*, (2003) membagi ukuran perusahaan menjadi 3 yaitu *small* (kecil), *medium* (sedang) dan *large* (besar) berdasarkan market value perusahaan. Sedangkan Jama'an (2008) melihat ukuran perusahaan dari nilai total asset.

#### **7. Kualitas Kantor Akuntan Publik**

Kantor Akuntan Publik (KAP), yang dimaksud berkualitas dalam penelitian ini mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 yang mengatur Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 yang mengatur kembali Jasa Akuntan Publik dengan mengganti Keputusan Menteri Keuangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Jasa Akuntan Publik pasal 1 dan termaksud pula di dalam UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik.

Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. Sehingga dalam penelitian ini jumlah partner (sekutu) yang mempunyai izin akuntan dalam badan usaha menjadi ukuran kualitas kantor akuntan public yang menjadi sampel penelitian.

## **B. PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **1. Mekanisme Corporate Governance**

*Corporate governance* digunakan sebagai sistem dan struktur yang mengatur hubungan antara manajemen dengan pemilik baik mayoritas maupun minoritas. Penerapan *Corporate governance* menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pemegang saham terutama pemegang saham minoritas. Pelaksanaan *corporate governance* diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang akhirnya dapat meningkatkan daya informasi akuntansi. Kualitas laporan keuangan dapat diukur dari reaksi pasar atas pengumuman laporan keuangan (Wawo, 2010).

#### **a. Kepemilikan Institusional**

Komposisi kepemilikan saham memiliki dampak yang penting pada sistem kendali perusahaan (Rawi, 2010). Namun sebagaimana dalam teori keagenan (*Agency theory*), perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan. Kepemilikan institusional meningkatkan tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional yang dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri dan juga dapat membatasi perilaku para manajer untuk melakukan pengelolaan laba. Penelitian yang dilakukan Gayatri (2013) menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini berbeda dengan

penelitian yang diungkapkan oleh Rustiarini (2010) yang menyatakan bahwa dalam proporsi yang besar kepemilikan institusional dapat mempengaruhi nilai perusahaan yang diwujudkan dengan terciptanya pengawasan yang efektif sehingga laporan keuangan yang dibuat memiliki integritas yang tinggi.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa semakin banyak proporsi kepemilikan institusional yang dapat mendorong manajer untuk memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan dan dapat mempengaruhi nilai perusahaan yang diwujudkan dengan terciptanya pengawasan yang efektif sehingga laporan keuangan yang dibuat manajemen memiliki integritas yang tinggi. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

**H<sub>1</sub> : Proporsi kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.**

**b. Kepemilikan Manajerial**

Menurut Widarjo *et al.*, (2010) kepemilikan manajerial adalah situasi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus pemilik atau pemegang saham perusahaan. Manajer yang memiliki saham dalam perusahaan akan berusaha meningkatkan kinerja perusahaan, karena dengan meningkatnya laba perusahaan maka insentif yang diterima oleh manajer akan meningkat pula. Sebaliknya apabila kepemilikan manajer turun, maka biaya keagenannya akan meningkat. Hal ini dikarenakan manajer akan



melakukan tindakan yang tidak memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, manajer akan cenderung memanfaatkan sumber-sumber perusahaan untuk kepentingannya sendiri.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Safiq (2010) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kepemilikan manajerial dengan konservatisme akuntansi (integritas laporan keuangan).

**H<sub>2</sub>: Proporsi kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan.**

**c. Komite Audit**

Menurut Komite Nasional *Good Corporate Governance* (KNGCG) (2002), Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan direksi yang bertugas melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit ekstern. Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggungjawab komite audit adalah memonitor dan mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi, memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit, serta menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal.

Klien (2002) memberikan bukti secara empiris bahwa perusahaan yang membentuk komite audit independen melaporkan laba dengan kandungan akrual dikrisisioner yang lebih kecil dibandingkan dengan

perusahaan yang tidak membentuk komite audit independen. Gayatri (2013) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini senada dengan Wawo (2010:4) yang menemukan bahwa perusahaan yang tidak ada kecurangan lebih mungkin memiliki komite audit dibanding yang ada kecurangan.

Dari referensi diatas, perusahaan yang memiliki komite audit cenderung memiliki integritas laporan keuangan yang tinggi, karena cenderung tidak adanya kecurangan, dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki komite audit. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>3</sub> : Komite audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.**

**d. Komisaris Independen**

Proporsi anggota independen dalam dewan komisaris dikatakan sebagai indikator independensi dewan. Kehadiran komisaris independen dapat meningkatkan kualitas pengawasan karena tidak terafiliasi dengan perusahaan sehingga bebas dalam pengambilan keputusan. Penelitian yang dilakukan Gayatri (2013) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Teori ini sering disebut dengan *the monitoring effect theory*. Maizaroh *et al.*,(2011) menunjukkan adanya hubungan terbalik antara proporsi komisaris independen dengan tingkat kecurangan pelaporan keuangan. Perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang tinggi cenderung lebih

memperhatikan risiko perusahaan dibandingkan proporsi komisaris independen yang rendah (Maizaroh *et al.*,2011).

Dari hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang tinggi memiliki integritas laporan keuangan yang tinggi, karena mereka lebih memperhatikan resiko perusahaanya. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>4</sub> : Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.**

**e. Ukuran perusahaan**

Nuryaman (2009) mengungkapkan perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Semakin besar suatu perusahaan, maka perusahaan akan menghadapi biaya politik yang tinggi, perusahaan besar akan menghadapi tuntutan lebih besar dari para stakeholder untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan.

Nasution dan Setiawan (2007) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki peranan penting dalam penyajian laporan keuangan dengan integritas yang lemah. Ukuran perusahaan yang kecil dianggap lebih banyak melakukan praktik manajemen laba daripada perusahaan besar. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan, biasanya

informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam saham perusahaan tersebut semakin banyak dan perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan. Berbeda dengan perusahaan kecil yang cenderung ingin memperlihatkan kondisi perusahaan yang selalu berkinerja baik agar investor menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut.

Agnes Sawir (2004) menyatakan ukuran perusahaan dinyatakan sebagai determinan dari struktur keuangan. Pertama, ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal. Perusahaan kecil umumnya kekurangan akses ke pasar modal yang terorganisasi, baik untuk obligasi maupun saham. Walaupun mereka memiliki akses, biaya penerbitan penjualan sejumlah kecil sekuritas dapat menjadi penghambat. Jika penerbitan sekuritas dapat dilakukan, sekuritas perusahaan kecil mungkin kurang dapat dipasarkan sehingga membutuhkan penentuan harga sedemikian rupa agar investor mendapatkan hasil yang memberikan return lebih tinggi secara signifikan.

Kedua, ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar-menawar dalam kontrak keuangan. Perusahaan besar biasanya dapat memilih pendanaan dari berbagai bentuk utang, termasuk penawaran khusus yang lebih menguntungkan dibandingkan yang ditawarkan perusahaan kecil. Semakin besar jumlah uang yang digunakan, semakin besar

kemungkinan pembuatan kontrak yang dirancang sesuai dengan preferensi kedua pihak sebagai ganti dari penggunaan kontrak standar utang.

Ketiga, ada kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan return membuat perusahaan yang lebih besar dapat memperoleh laba dalam jumlah yang lebih banyak. Akhirnya, ukuran perusahaan diikuti oleh karakteristik lain yang mempengaruhi struktur keuangan. Karakteristik lain tersebut seperti perusahaan sering tidak mempunyai staf khusus, tidak menggunakan rencana keuangan dan tidak mengembangkan sistem akuntansi mereka menjadi suatu sistem manajemen. Dengan demikian maka hipotesis alternatif yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

**H<sub>5</sub>: Ukuran Perusahaan (firm size) berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.**

**f. Kualitas Kantor Akuntan Publik**

Spesialisasi industri adalah atas banyaknya jasa attestasi atau banyaknya klien industri sejenis dengan yang dikerjakan atau ditangani oleh auditor KAP dalam tahun pengamatan, juga menjadikan ukuran dalam penelitian ini kualitas kantor akuntan publik terhadap integritas informasi laporan keuangan. Aspek spesialisasi industri ini dapat mempengaruhi kualitas audit oleh KAP, disamping karakteristik industri yang berpengaruh pada suatu perusahaan lebih besar dibanding perusahaan dengan perusahaan lain. Adanya perbedaan ini membutuhkan

keahlian tertentu untuk bisa mendeteksi dengan lebih baik seberapa besar pengaruh tersebut (Mayangsari, 2003).

Kombinasi antara faktor-faktor khusus perusahaan dan industri menghasilkan variasi permintaan terhadap monitoring serta konsekuensinya pada kualitas audit (Mayangsari, 2003). Spesialisasi industri yang dimiliki oleh kantor akuntan mempunyai dampak positif karena dapat meningkatkan audit fee (Francis dan Stokes 1986). Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa auditor menawarkan berbagai tingkat kualitas audit untuk merespon adanya variasi permintaan klien terhadap kualitas audit. Penelitian-penelitian sebelumnya membedakan kualitas auditor berdasarkan perbedaan *big five* dan non *big five* dan ada juga yang menggunakan spesialisasi industri auditor untuk memberi nilai bagi kualitas audit ini seperti penelitian Mayangsari (2003).

Teoh (1993) berargumen bahwa kualitas audit berhubungan positif dengan kualitas earnings, yang diukur dengan *Earnings Response Coefficient* (ERC). Penelitian kali ini menilai kualitas auditor berdasarkan pengelompokkan auditor *big four* dengan non *big four*, dikarenakan salah satu KAP *big five* yaitu *Arthur Andersen* telah dinyatakan collapsed. Lennox (2000) mengemukakan bahwa KAP yang besar memiliki insentif yang lebih untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak reputasinya dibandingkan dengan KAP yang lebih kecil.

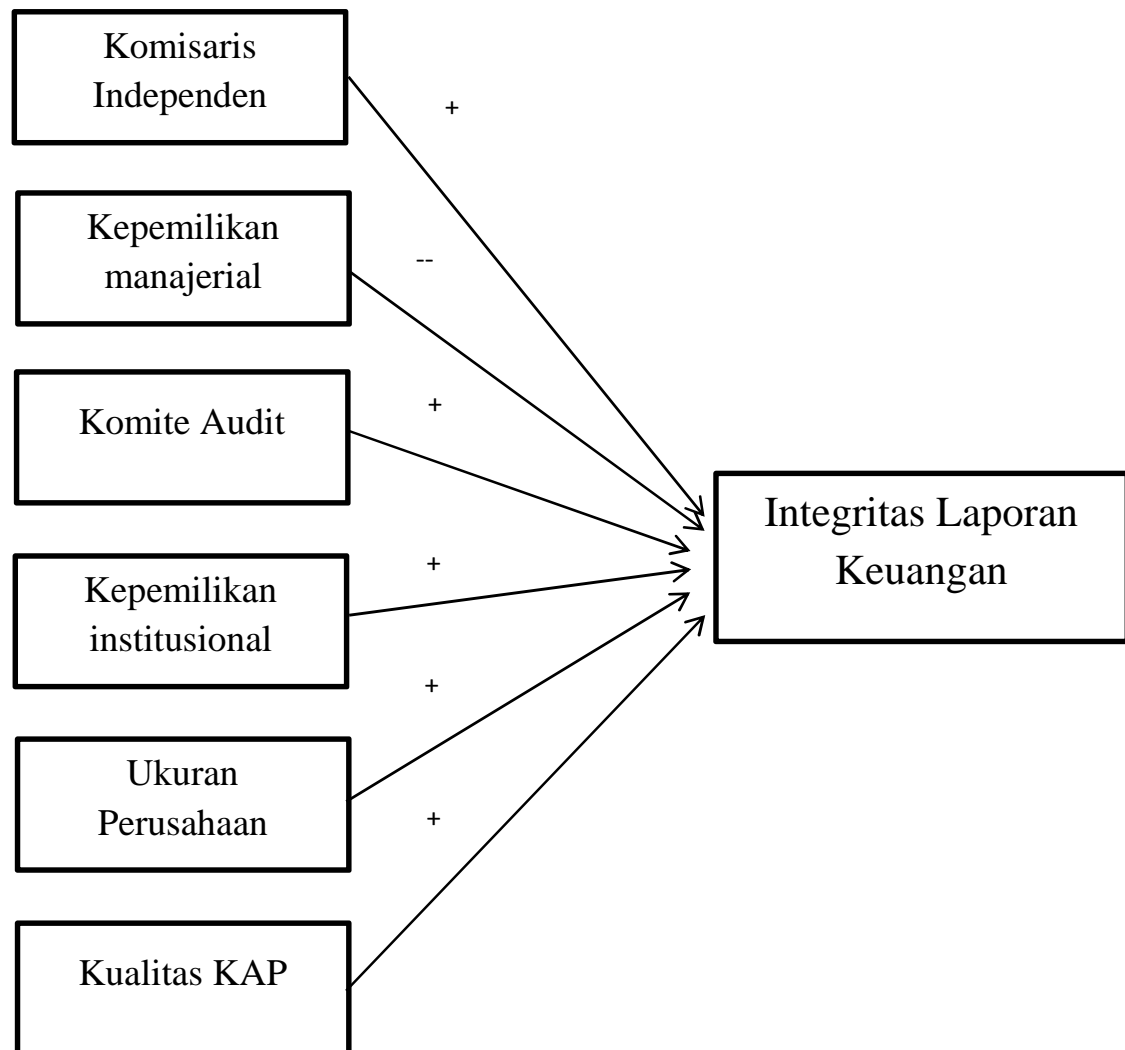
Berdasarkan uraian di atas, hipotesis kualitas KAP badan usaha (jumlah patner izin akuntan) diharapkan dapat diterima. Dengan demikian, maka hipotesis yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

**H<sub>6</sub> : Kualitas kantor akuntan publik, badan usaha berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan**

### C. Model penelitian

Variabel Independen

Variabel Independen



**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian**